



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 44 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK BANDAR UDARA BARU PADANG  
SUMATERA BARAT**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan lokasi Bandar Udara Baru Padang dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 1999 Tanggal 23 Juni 1999, perlu menetapkan rencana induk bandar udara sebagai pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara serta pencegahan tanah guna menjamin kelangsungan dan kelancaran operasi bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas dan berdasarkan hasil studi rencana induk bandara baru Padang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Baru Padang-Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen:

4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-86 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Bandara Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 551.23/171/Perek/1999 tanggal 8 Februari 1999;  
2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.04.01-MN/195 tanggal 30 April 1999;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA BARU PADANG SUMATERA BARAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Baru Padang (pengganti Bandar Udara Tabing Padang), yang akan dibangun pada lokasi di Ketaping Padang.
2. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasaranaanya.
4. Rancangan Teknik Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan, serta fasilitas elektronika dan listrik sebagai penunjang keselamatan penerbangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pengelolaan dan pengusahaan bandar udara sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan seluas ± 482 Ha.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan sumbu Y = 20.000 meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth  $334^{\circ} 13'53''$  geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 33 tegak lurus sumbu X.

#### Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada Lampiran I.A;
- (2) Batas Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum pada lampiran I. B.1 dan I. B.2.

#### Pasal 4

Lokasi dan kebutuhan lahan untuk sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kebutuhan.

## BAB III

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

#### Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II B.

- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan utama bandar udara baru Padang dimaksud bernuansa gaya arsitektur rumah adat tradisionil Minangkabau.

#### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

#### Pasal 7

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

#### Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum dalam Lampiran III;
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan yang belum diatur sebagaimana dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan tahun 2015 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 11

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 12

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

#### Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 23 JUNI 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIARDJONO

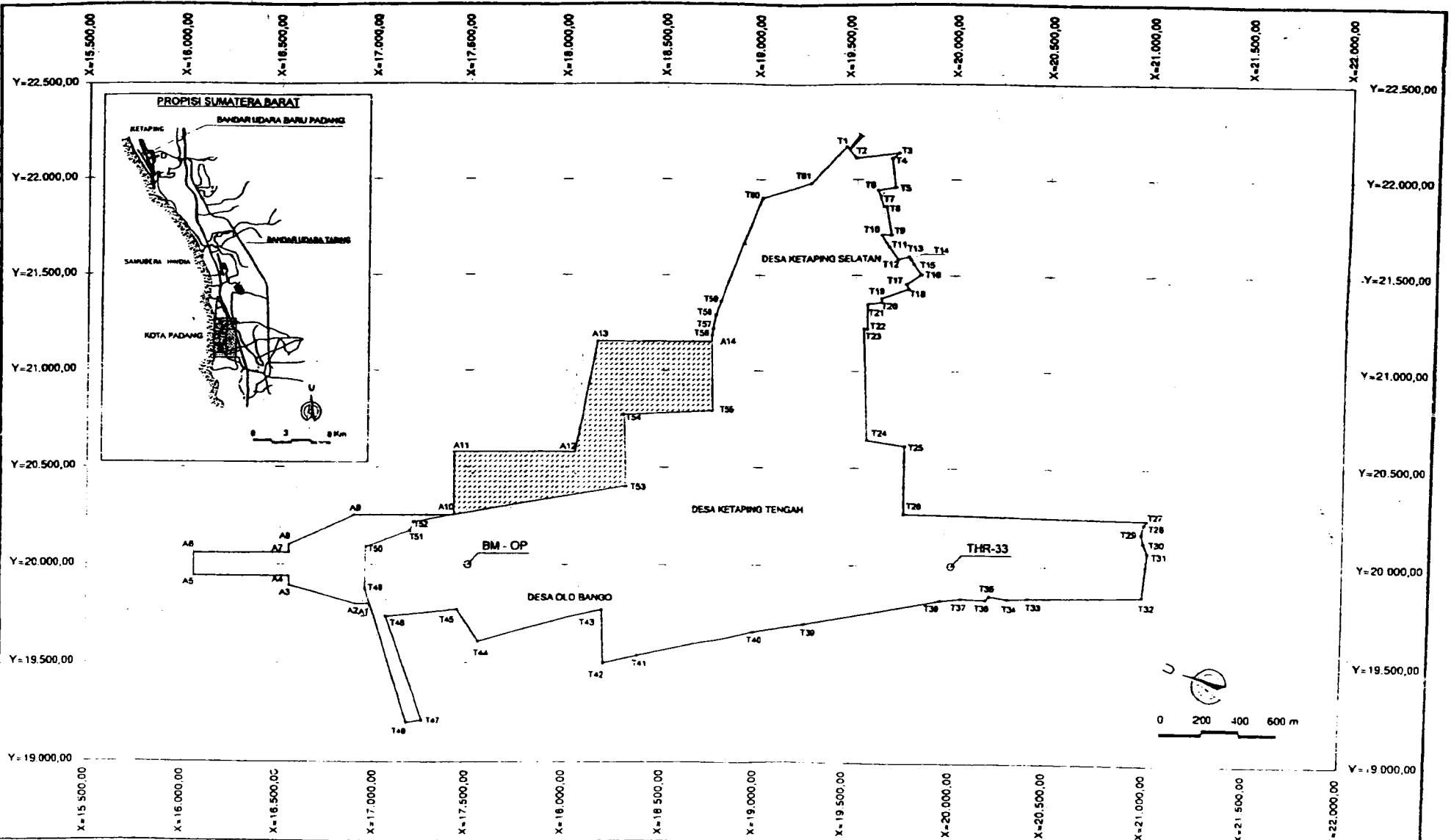
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekuin;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
4. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI;
8. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
9. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
11. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Jaksa Agung RI;
13. KAPOLRI;
14. Gubernur Bank Indonesia;
15. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Perhubungan;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman;
18. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
19. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Barat;
20. Para Atase Perhubungan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
21. Direksi PT (Persero) Garuda Indonesia;
22. Direksi PT (Persero) Merpati Nusantara;
23. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
24. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
25. DPP INACA.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen Resmi  
Ketum dan Organisasi,

ZULFIQARAIN DEYOEB, SH, MM  
NIP. 20106134



#### DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

TITIK SISTEM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS - 64	
X (meter)	Y (meter)	L5	B1
15.500,00	20.000,00	0	48
16.000,00	20.000,00	0	100
16.500,00	20.000,00	0	16
17.000,00	20.000,00	34,991	
17.500,00	20.000,00		
18.000,00	20.000,00		
18.500,00	20.000,00		
19.000,00	20.000,00		
19.500,00	20.000,00		
20.000,00	20.000,00		
20.500,00	20.000,00		
21.000,00	20.000,00		
21.500,00	20.000,00		
22.000,00	20.000,00		
22.500,00	20.000,00		

#### LEGENDA



LAMPIRAN IA  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 44 TAHUN 1999  
TANGGAL 23 JUNI 1999

DISAHKAN DI JAKARTA  
TANGGAL

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

#### DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA BARU

PADANG

NAMA GAMBAR

NOMOR

LEMBAR

KEBUTUHAN LAHAN 01 Q2

Lampiran : I.B.1  
 Surat Keputusan Menteri Perhubungan  
 Nomor : KM.44 tahun 1999  
 Tanggal : 23 Juni 1999

**DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA BARU PADANG  
 YANG SUDAH DIBEBASKAN**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA ( ACS )		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS-84							
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X ( meter )	Y ( meter )	X ( meter )	Y ( meter )	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
T. 1	19440	22175	644830.46	9913198.33	0	47	06	100	18	06
T. 2	19490	22115	644798.13	9113127.23	0	47	09	100	18	05
T. 3	19705	22140	644914.05	9912944.44	0	47	15	100	18	09
T. 4	19670	22112	644873.63	9912963.80	0	47	14	100	18	08
T. 5	19688	21960	644744.54	9912881.56	0	47	17	100	18	04
T. 6	19600	21945	644692.80	9912954.30	0	47	14	100	18	02
T. 7	19630	21860	644629.27	9912890.36	0	47	16	100	17	60
T. 8	19645	21860	644635.79	9912876.85	0	47	17	100	18	00
T. 9	19670	21712	644513.35	9912790.03	0	47	20	100	17	56
T. 10	19620	21715	644494.33	9912836.37	0	47	18	100	17	55
T. 11	19660	21650	644453.16	9912772.10	0	47	20	100	17	54
T. 12	19705	21585	644414.16	9912703.34	0	47	22	100	17	53
T. 13	19760	21600	644451.57	9912660.31	0	47	24	100	17	54
T. 14	19770	21585	644442.40	9912644.79	0	47	24	100	17	54
T. 15	19785	21562	644428.20	9912621.29	0	47	52	100	17	53
T. 16	19825	21505	644394.24	9912560.50	0	47	27	100	17	52
T. 17	19750	21455	644316.62	9912606.33	0	47	26	100	17	50
T. 18	19760	21430	644298.45	9912586.46	0	47	26	100	17	49
T. 19	19625	21380	644194.76	9912686.33	0	47	23	100	17	46
T. 20	19625	21360	644176.75	9912677.65	0	47	23	100	17	45
T. 21	19555	21350	644137.33	9912736.35	0	47	21	100	17	44
T. 22	19555	21220	644020.24	9912679.88	0	47	23	100	17	40
T. 23	19535	21222	644013.35	9912698.76	0	47	23	100	17	40
T. 24	19555	20645	643502.33	9912430.08	0	47	31	100	17	23
T. 25	19750	20615	643560.03	9912241.41	0	47	38	100	17	25
T. 26	19750	20265	643244.78	9912089.36	0	47	42	100	17	15
T. 27	21000	20240	643765.29	9910952.61	0	48	19	100	17	32
T. 28	20985	20215	643736.26	9910955.26	0	48	19	100	17	31
T. 29	20975	20170	643691.38	9910944.72	0	48	20	100	17	30
T. 30	20985	20125	643655.20	9910916.17	0	48	21	100	17	28

Lampiran : I.B.1  
 Surat Keputusan Menteri Perhubungan  
 Nomor : KM.44 Tahun 1999  
 Tanggal : 23 Juni 1999

DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA BARU PADANG  
 YANG SUDAH DIBEBASKAN

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA ( ACS )		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS-84							
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X ( meter )	Y ( meter )	X ( meter )	Y ( meter )	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
T. 31	21005	20075	643618.85	9910876.43	0	48	22	100	17	27
T. 32	20985	19850	643407.50	9910796.70	0	48	25	100	17	20
T. 33	20410	19840	643148.00	9911310.26	0	48	08	100	17	12
T. 34	20295	19835	643094.24	9911411.67	0	48	05	100	17	10
T. 35	20200	19850	643066.48	9911503.75	0	48	02	100	17	09
T. 36	20180	19830	643039.77	9911513.08	0	48	01	100	17	09
T. 37	20050	19835	642987.80	9911722.57	0	47	55	100	17	07
T. 38	19945	19825	642933.18	9913950.52	0	46	36	100	16	05
T. 39	19245	19700	642516.49	9912298.76	0	47	28	100	16	52
T. 40	18980	19660	642365.34	9912520.07	0	47	12	100	16	47
T. 41	18370	19540	641992.26	9913017.37	0	47	08	100	16	35
T. 42	18195	19500	641880.20	9913157.62	0	47	04	100	16	31
T. 43	18185	19773	642121.75	9913285.23	0	47	47	100	16	39
T. 44	17555	19610	641701.25	9913781.86	0	46	42	100	16	28
T. 45	17443	19773	641799.41	9913953.55	0	46	03	100	16	22
T. 46	17055	19738	641590.32	9914287.82	0	46	44	100	16	09
T. 47	17255	19210	641210.64	9913878.30	0	46	42	100	16	08
T. 48	17170	19200	641164.70	9913950.52	0	46	27	100	16	25
T. 49	16943	19880	641681.67	9914448.55	0	46	26	100	16	25
T. 50	16945	20093	641705.99	9914460.28	0	46	25	100	16	36
T. 51	17180	20175	642046.30	9914362.41	0	46	28	100	16	38
T. 52	17200	20220	642098.56	9914357.64	0	46	29	100	16	42
T. 53	18300	20405	642928.61	9913536.72	0	46	55	100	17	26
T. 54	18283	20775	643064.31	9913612.16	0	46	53	100	18	17
T. 55	18750	20795	643286.29	9913214.07	0	47	59	100	17	28
T. 56	18745	21187	643638.63	9913395.11	0	47	60	100	17	29
T. 57	18750	21220	643670.53	9913404.94	0	46	59	100	17	31
T. 58	18765	21295	643744.59	9913424.02	0	46	59	100	17	34
T. 59	18790	21365	643818.50	9913431.91	0	46	58	100	17	53
T. 60	19010	21905	644400.46	9913468.34	0	46	04	100	17	58
T. 61	19260	21985	644581.12	9913277.92	0	47	06	100	17	58



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kualitasnya Hukum dan Organisasi,

Giri S. Hadihardjono

MENTERI PERHUBUNGAN

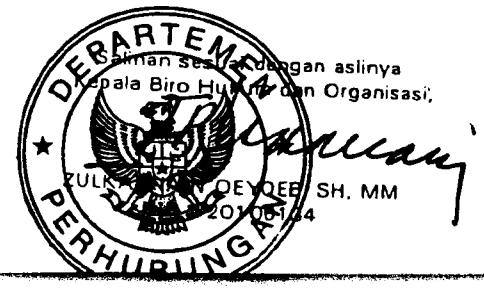
ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Lampiran : I.B.2  
 Surat Keputusan Menteri Perhubungan  
 Nomor : KM. 44 Tahun 1999  
 Tanggal : 23 Juni 1999

**DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA BARU PADANG  
 YANG BELUM DIBEBASKAN**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA ( ACS )		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84							
	X ( meter )	Y ( meter )	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
			X ( meter )	Y ( meter )	LINTANG SELATAN		BUJUR TIMUR			
A. 1	16966	19800	641616.50	9914394.92	0	46	25	100	16	22
A. 2	16895	19800	641585.66	9914458.87	0	46	14	100	16	21
A. 3	16550	19892	641518.65	9914809.58	0	46	16	100	16	19
A. 4	16650	19940	641605.32	9914740.36	0	46	59	100	16	22
A. 5	16050	19940	641344.67	9915240.78	0	45	57	100	16	22
A. 6	16050	20060	641452.75	9915332.92	0	45	12	100	16	14
A. 7	16550	20060	641669.96	9914882.58	0	46	11	100	16	17
A. 8	16550	20102	641707.79	9914900.81	0	46	19	100	16	24
A. 9	16884	20255	641990.70	9914666.44	0	46	34	100	16	25
A. 10	17425	20254	642224.83	9914178.72	0	46	30	100	16	35
A. 11	17425	20335	642522.96	9914322.52	0	43	48	100	16	42
A. 12	18035	20585	642787.96	9913773.09	0	46	42	100	17	00
A. 13	18123	21162	643345.90	9913944.49	0	46	00	100	17	18
A. 14	18618	21162	643616.11	9913384.25	0	47	60	100	17	27
T. 49	16943	19880	641681.67	9914448.55	0	46	26	100	16	25
T. 50	16945	20093	641705.99	9914460.28	0	46	25	100	16	25
T. 51	17180	20175	642046.30	9914362.41	0	46	28	100	16	36
T. 52	17200	20220	642098.56	9914357.64	0	46	29	100	16	38
T. 53	18300	20405	642928.61	9913536.72	0	46	55	100	17	42
T. 54	18283	20775	643064.31	9913612.16	0	46	53	100	18	26
T. 55	18750	20795	643286.29	9913214.07	0	47	59	100	17	17



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIARDJONO

Lampiran : II. A

Surat Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KM.44 Tahun 1999  
Tanggal : 23 Juni 1999

PERKEMBANGAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

NO.	URAIAN	TAHUN		KETERANGAN
		2005 (Tahap I)	2015 (Tahap II)	
I	PENUMPANG (Per Tahun)			
	- Internasional	46,000	61,000	
	- Domestik	576,000	1,159,000	
	- Total	622,000	1,220,000	
II	KARGO (Ton / Tahun)			
	- Internasional	450	1,020	
	- Domestik	6,650	14,880	
	- Total	7,100	15,900	
III	PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun)			
	- Internasional	520	838	
	- Domestik	6,520	10,502	
	- Total	7,040	11,340	
IV	JAM SIBUK PENUMPANG			
	- Internasional	60	119	
	- Domestik	672	1,136	
	- Total	732	1,255	
V	JAM SIBUK PESAWAT			
	- Internasional	1	1	
	- Domestik	4	5	
	- Total	5	6	

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIARDJONO



Balinan sesuai dengan aslinya

Menala Dibutuhkan dan Organisasi

YULKAHRIZI SEYDEES SH, MM

NIP. 120186184

**RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN  
 FASILITAS BANDAR UDARA BARU PADANG**

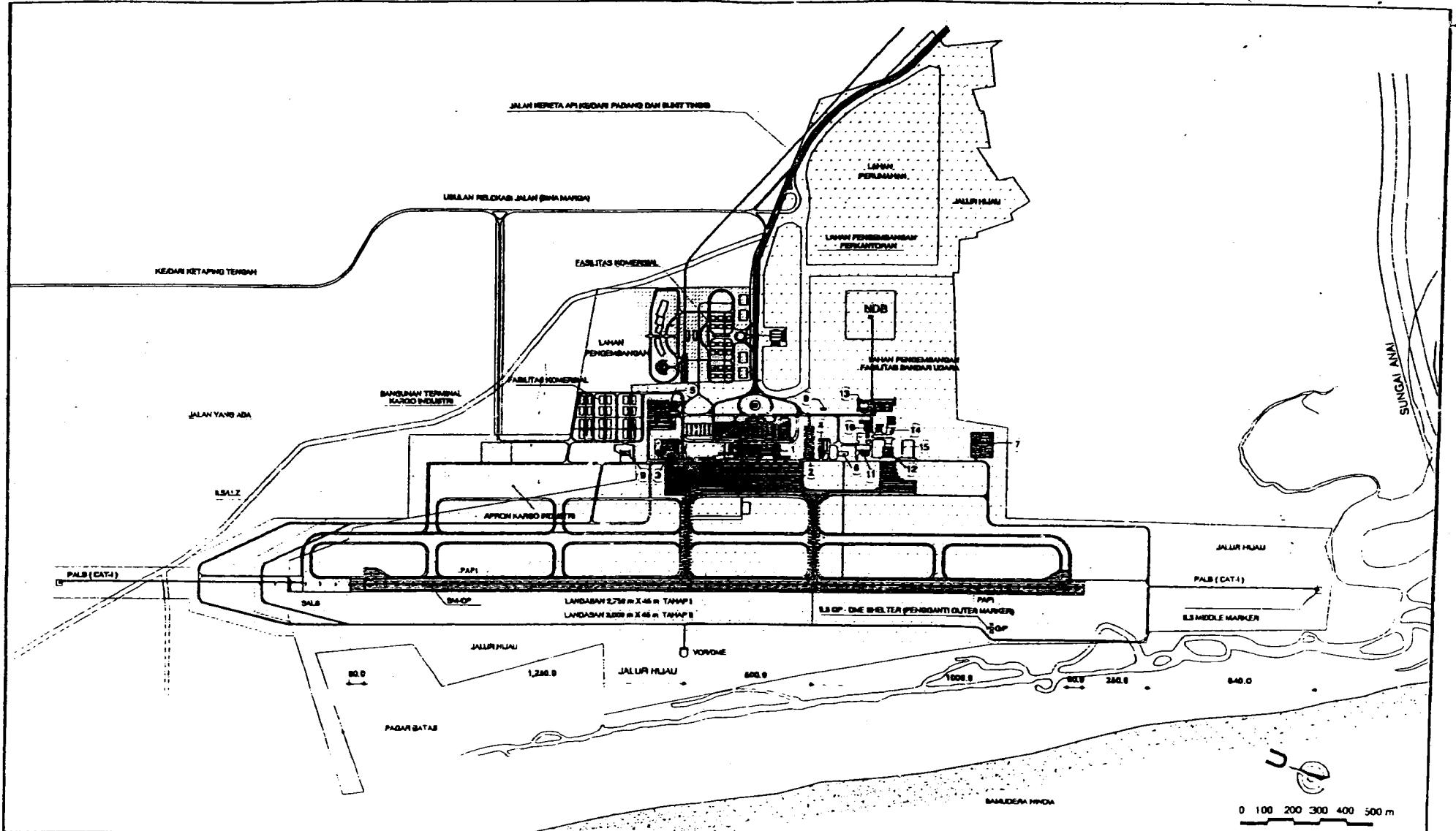
NO.	URAIAN	TAHUN		KETERANGAN
		2005 (Tahap I)	2015 (Tahap II)	
I	<b>FASILITAS SISI UDARA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat terbesar</li> <li>- Landasan pacu ( Runway )</li> <li>- Strip landasan pacu ( Runway Strip )</li> <li>- Kekuatan landasan pacu</li> <li>- Penghubung landasan pacu ( Taxiway )</li> <li>- Exit Taxiway</li> <li>- Parallel Taxiway</li> <li>- Tempat parkir pesawat ( Apron )</li> <li>Kapasitas : MD 11 / A 300 B 737 / F 28 F 27 DHC 6 / CN 212 Total</li> </ul>	MD 11 / A 300 2.750 x 45 2.870 x 300 65 / F / C / X / T	MD 11 / A 300 3.000 x 45 3.120 x 300 76 / F / C / X / T	m m m buah pesawat pesawat pesawat pesawat pesawat
	Luas	37,000	63,000	m 2
II	<b>FASILITAS SISI DARAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan terminal penumpang Domestik</li> <li>Internasional</li> <li>Total</li> <li>- Bangunan terminal kargo</li> <li>- Tempat parkir kendaraan</li> <li>Kapasitas</li> <li>Luas</li> <li>- D P P U</li> <li>- Bangunan operasi</li> <li>- Menara pengawas lalu lintas udara</li> <li>- Bangunan VIP</li> <li>- Bangunan administrasi / perkantoran</li> <li>- Bangunan NDB</li> <li>- Bangunan PKP-PK</li> <li>- Bangunan Hanggar</li> <li>- Bangunan pemeliharaan bandar udara</li> <li>- Bangunan pemeliharaan GSE</li> <li>- Bangunan pemeliharaan kendaraan</li> </ul>	1,125 11,445 12,570	1,550 15,750 17,300	m 2 m 2 m 2
		1,360	3,060	m 2
		310	530	kendaraan
		10,454	18,550	m 2
		1.500	2,000	kilo liter
		2,112	2,112	m2
		540	540	m2
		200	200	m2
		271	271	m2
		77	77	m2
		623	623	m2
		2,100	2,100	m2
		669	669	m2
		621	621	m2
		377	377	m2
III	<b>FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN</b>	NDB, DVOR / DME, ILS DGPS, GNSS, LLZ GP / DME, MM, OM / Locator UHV Ling, RCSM	NDB, DVOR / DME, ILS DGPS, GNSS, LLZ GP / DME, MM, OM / Locator UHV Ling, RCSM	
IV	<b>ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL</b>	ALS Cat-1, MALS RWEL, PAPI, IWDI Runway lighting Taxiway lighting Threshold lighting Runway end lighting Apron lighting, Stop lights	ALS Cat-1, MALS RWEL, PAPI, IWDI Runway lighting Taxiway lighting Threshold lighting Runway end lighting Apron lighting, Stop lights	
V	<b>FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN</b>	VHV A/G Com VHV A/G Trans Pemancar VHV UHF Transceiver UHF Link, AFTN, MCTR	VHV A/G Com VHV A/G Trans Pemancar VHV UHF Transceiver UHF Link, AFTN, MCTR	



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIARDJONO



#### KETERANGAN :

- 1 BANGUNAN TERMINAL PENUMPANG
  - 2 BANGUNAN TERMINAL VVIP
  - 3 BANGUNAN TERMINAL KARGO
  - 4 BANGUNAN OPERASI
  - 5 DEPOT BAHAN BAKAR PESAWAT UDARA
  - 6 PKPK
  - 7 LOKASI BANGUNAN METEOROLOGI
  - 8 BANGUNAN SAR
  - 9 BANGUNAN KATERING
  - 10 BANGUNAN PEMELIHARAAN BANDAR UDARA
  - 11 BANGUNAN PEMELIHARA GSE
  - 12 BANGUNAN PEMERINTAH
  - 13 BANGUNAN CITRA MULYA
  - 14 BANGUNAN PENERBANGAN
  - 15 BANGUNAN PEMERINTAH
- Salinan sesuai dengan aslinya  
Kuala Bantukum, Organisasi



#### LEGENDA :

- PEMBANGUNAN FASILITAS TAHAP I
- PEMBANGUNAN FASILITAS TAHAP II
- PEMBANGUNAN FASILITAS TAHAP III
- LAHAN PENGEMBANGAN TAHAP I DAN II
- LAHAN PENGEMBANGAN TAHAP III

LAMPIRAN : III  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 44 TAHUN 1999  
TANGGAL : 23 JUNI 1999

DISAHKAN DI JAKARTA  
TANGGAL :

MENTERI PERHUBUNGAN

tt

GIRI S. HADIHARDJONO

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA BARU

PADANG

NAMA GAMBAR	NOMOR	LEMBAR
RENCANA INDUK	02	02